

Lampung Post

Tribun Lampung

Halaman

Radar Lampung

4

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGU	SEP	OKT	NOV	DES	2021
						<input checked="" type="checkbox"/>							

Kabupaten Pesawaran

Defisit Rp756 Juta

PESAWARAN - DPRD Pesawaran menyetujui rancangan peraturan daerah (raperda) pertanggungjawaban APBD 2020 sekitar Rp1,275 triliun. Persetujuan itu berlangsung dalam rapat paripurna yang digelar di gedung DPRD setempat.

"Pembahasan dan evaluasi atas pelaksanaan APBD 2020 mendapat beberapa rekomendasi sangat berharga sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan APBD akan datang. Saya sangat menyadari bahwa pelaksanaan APBD 2020 belum menyentuh kebutuhan dan aspirasi seluruh masyarakat," ungkap Bupati Pesawaran Dendi Ramadhona, Jumat (18/6).

Pembangunan yang sudah, sedang dan akan dilaksanakan, dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan. Dengan penentuan skala prioritas sebagai akibat dari masih rendahnya kapasitas fiskal pemerintah daerah. Oleh karena itu, pemerintah kabupaten bersama DPRD akan bersama-sama meningkatkan kapasitas fiskal.

"Saya menyadari bahwa penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2020 masih jauh dari sempurna. Sudah barang tentu terdapat kekurangan sana-sini. Karena itu, rekomendasi DPRD sangat kami harapkan agar dapat menyempurnakan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2020," ucapnya.

Hasil pembahasan antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD diperoleh

kesimpulan bahwa dari sisi pendapatan 2020 terealisasi sebesar Rp1.275.131.350.807,13. Dari sisi belanja terealisasi sebesar Rp1.275.887.434.820,42. Sehingga terjadi defisit anggaran sebesar Rp756 juta.

Dari sisi pembiayaan terdapat realisasi penerimaan pembiayaan atas Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) tahun lalu Rp13,307 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan Rp2,602 miliar. Sehingga pembiayaan netto Rp10,705 miliar. Dengan demikian, maka berdasarkan perhitungan terdapat Silpa 2020 sebesar Rp9,948 miliar.

"Laporan pertanggungjawaban ini merupakan cerminan tingkat kinerja

seluruh program dan kegiatan yang ada Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang diukur dalam satuan uang," jelasnya.

Oleh karena, bupati meminta kepada seluruh kepala OPD dan jajarannya agar mengoptimalkan pelaksanaan APBD tahun yang akan datang. Sehingga pencapaian visi dan misi Pesawaran lebih maju dan lebih sejahtera dapat terwujud.

Untuk itu, putra anggota Komisi II DPRD RI Zulkifli Anwar ini berharap saran dan kritik membangun dari seluruh pimpinan dan anggota DPRD. Khususnya yang terlibat dalam Badan Anggaran DPRD, akan dijadikan pedoman dalam penyusunan anggaran

pada masa yang akan datang.

Tahapan selanjutnya setelah disetujui bersama, Raperda tersebut harus disampaikan paling lambat tiga hari sejak disetujui bersama, harus disampaikan ke Pemerintah Provinsi Lampung untuk evaluasi oleh TAPD provinsi.

Hal ini berdasarkan Permendagri 21/2011 atas perubahan kedua kali dari Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. "Saya selaku bupati Pesawaran menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan selama lima tahun ini. Namun saya percaya dengan modal kebersamaan dalam azas kekeluargaan dan kegotongroyongan," pungkasnya. (ozl/c1/dna)